

## ANALISIS PENERAPAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**Nova Kurniawati, Vidya Vitta Adhivinna**

Universitas PGRI Yogyakarta

Jl. PGRI I No. 117, Sonosewu, Bantul, Yogyakarta.

*email:* [novakurniawati23@gmail.com](mailto:novakurniawati23@gmail.com)

### **Abstract**

*The performance of The goverment institutions is now under the spotlight along with the improvement in public awareness on the course of general public administration. People are getting more and more intelligent and critical. They have demand for transparancy, clean, economical, effectual, responsive and accountable. The aim of this research is to discover the financial performance of Pemerintah Kabupaten Bantul during year 2010-2013. The test was done by using value for money method to measure the financial performance from the perspective of economy, effectiveness and efficiency which has shown in the annual budgetary report and realization from 2010-2013. The result from financial analysis on Pemerintah Kabupaten Bantul has shown that in economic perspective the financial management in Bantul can be said to be economical in year 2010 and getting better in 2011-2013. From effectiveness it can be said to be very effectual from 2010 till 2013, and from efficiency perspective Bantul Administration was not efficient in 2010, but in 2011 can be said to be very efficient and then in 2012-2013 can be said to be inefficient.*

**Keywords:** *Economical, Efficiency, Effectiveness.*

### **Pendahuluan**

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total yaitu intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2009). Tuntutan otonomi ini juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Salah satu Ketetapan MPR Nomor XV/-

MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagaian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan segera membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah (Mardiasmo, 2009).

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat yaitu: Pertama, mendorong peningkatan partisipasi,

prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2009).

Peraturan Pemerintah No.108/2000 tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah menyarankan agar setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, norma perhitungan APBD, laporan arus kas, dan neraca daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa laporan realisasi anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah (Nugrahani, 2007).

Proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Padahal sejak diberlakukannya kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang sudah diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem yang dianut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan, sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil dan manfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai oleh anggaran tersebut (Natsir, 2008).

Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik adalah pengukuran kinerja yang tradisional. Metode ini memusatkan pada aspek keuangan dengan menggunakan metode *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2009), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis, pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah untuk pencapaian *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik organisasi sektor publik termasuk pemerintah, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Liando, 2014).

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik, yaitu mengharapkan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

Anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang terbatas. Pemda Bantul tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada

masyarakat, tetapi seringkali terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran. Bastian (2007) menginterpretasikan anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dengan demikian tuntutan masyarakat mengharapkan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

### Penelitian Terdahulu

Liando (2014), dalam penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie menggunakan metode *Value For Money* oleh Liando, H. S. (2014). Hasil Penelitian ini Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie dari segi ekonomis disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangie dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisien harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, dari segi efektivitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kurrohmaan (2013), dalam penelitian berjudul Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis *Value For Money* Di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam Penelitian ini penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan sesudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Alni (2006), dalam penelitian berjudul Analisis Kinerja Keuangan Belanja Kegiatan dengan Pendekatan *Value For Money* pada Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini berdasarkan hasil pengukuran pada indikator *input* menunjukkan bahwa biro-biro yang terdapat pada

instansi sekretariat daerah provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2004 tidak menggunakan semua *input* dana/anggaran dari yang telah dianggarkan untuk setiap kegiatan, sedangkan jika dilihat dari pengukuran indikator *output* dapat dilihat bahwa sebagian besar target pencapaian fisik berhasil direalisasikan. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran hasil *outcome* dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi sekertaris daerah provinsi Sulawesi Selatan umumnya merasa puas dengan pencapaian rata-rata 70%.

Nazril (2013), dalam Penelitian berjudul Penerapan Konsep *Value For Money* dalam menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji Kota Makasar. Hasil Penelitian ini yaitu pelayanan rumah sakit umum daerah Labuang Baji Kota Makasar telah Memenuhi prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektifitas. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis kuisioner yang disebarakan kepada pelanggan/konsumen.

Nugrahani (2007), dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran provinsi DIY dari tahun 2001-2004 secara *absolute* cukup ekonomis, efisien dan efektif. Apabila kinerja berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep *value for money*, maka kinerja keuangan Pemda DIY cukup ekonomis dan efisien tetapi kurang efektif.

### Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan beberapa hasil penelitian di atas yang berkaitan dengan konsep *Value for Money* yang mengacu pada ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dari tahun 2010-2013 ekonomis.
- H2: Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dari Tahun 2010-

2013 efisien.  
 H3: Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dari Tahun 2010-2013 efektif.

**Metode Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah:

a) Rasio Ekonomi

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya di peroleh dengan harga lebih rendah yaitu harga yang mendekati harga pasar. Rasio ekonomis untuk analisis kinerja keuangan dapat diketahui menggunakan (Mahmudi, 2005).

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}}$$

b) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

c) Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan

PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

**Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2010-2013.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang bersumber dari data laporan keuangan APBD Kabupaten Bantul periode 2010-2013. Tujuannya adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis keuangan yang digunakan adalah alat analisis rasio yang diterapkan pada organisasi sektor publik.

**Hasil Penelitian**

**Data Keuangan**

Berikut ini merupakan data keuangan pemerintah kabupaten Bantul tahun anggaran 2010-2013.

**Tabel 1. Data Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.**

No.	Uraian	Tahun (dalam Ribuan)			
		2010	2011	2012	2013
1.	Pendapatan	986.866.902,07	1.180.547.112,41	1.337.570.725,56	1.520.302.695,31
2.	PAD	81.637.099,07	128.896.456,41	166.597.778,56	224.197.197,31
3.	Pajak Daerah	16.541.249,00	35.068.591,50	51.786.352,50	83.232.017,20
4.	Retribusi Daerah	15.978.422,00	17.798.603,00	20.595.098,00	27.116.286,00
5.	Pengeluaran Daerah	446.230,67	4.115.230,67	13.271.230,00	39.062.286,22

Sumber: DPPKAD Data sekunder, diolah 2015.

Dari tabel 1 bisa diketahui bahwa dalam total pendapatan pemerintah kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan 2013. Hal ini dipicu oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

### Analisis Konsep *Value for Money*

Sebelum melakukan analisis konsep *Value For Money*, terlebih dahulu menghitung berapa jumlah realisasi, anggaran, biaya dan target penerimaan asli daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Perhitungan Realisasi, Anggaran, Biaya, dan Target PAD Tahun Anggaran 2010–2013 (dalam Ribuan).**

Keterangan	2010	2011	2012	2013
Realisasi Penerimaan PAD	81.637.099,07	128.896.456,41	166.597.778,56	224.197.864,31
Anggaran Penerimaan PAD	89.015.027,59	115.321,75	141.624,47	205.407,07
Biaya untuk PAD	1.403.064,00	841.609,00	2.420.586,00	2.841.972,00
Target PAD Potensi Riil	32.519.672,00	52.867.195,50	72.363.450,50	110.348.303,20

Sumber: DPPKAD Data sekunder, diolah 2015.

### Uji Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan penerimaan PAD yang dibandingkan dengan anggaran penerimaan PAD. Kemampuan

daerah dalam menjalankan tugas dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio ekonomis pemerintah kabupaten Bantul:

**Tabel 3. Rasio Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2010-2013 (dalam Ribuan).**

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Ekonomi	Ket.
1.	2010	81.637,07	89.015,59	91,7%	*
2.	2011	128.896,41	113.321,75	111,7%	**
3.	2012	166.597,56	141.624,47	117,6%	**
4.	2013	224.197,31	205.407,07	109,1%	**

Sumber: Data Sekunder, diolah 2015.

Keterangan : \* : Ekonomis  
\*\* : Sangat Ekonomis

Dari tabel diatas menggambarkan analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bantul berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari ekonomis, efisien, dan efektivitas. Hasil uji *value for money* menunjukkan bahwa:

a. Pada tahun anggaran 2010 rasio ekonomi mencapai 91,7% angka tersebut berada pada rentang kurang dari 100% dimana

pemerintah kabupaten Bantul dikatakan cukup ekonomis karena perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dan anggaran penerimaan PAD cukup seimbang yaitu realisasi penerimaan PAD Rp. 81.637.099.293,07 dan anggaran penerimaan PAD Rp.89.015.027.964,59.

b. Pada tahun anggaran 2011 rasio ekonomi mencapai 111,7% angka tersebut berada diatas rentang 100% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten Bantul dikatakan sangat

- ekonomis karena merealisasikan penerimaan PAD melebihi anggaran yang direncanakan.
- c. Pada tahun anggaran 2012 rasio ekonomi mencapai 117,6% cenderung meningkat 5,9% dari tahun 2011. Angka rasio berada di atas rentang 100% dan pemerintah kabupaten Bantul masih dikatakan sangat ekonomis hal ini dipicu karena realisasi penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus meningkat.
- d. Pada tahun anggaran 2013 rasio ekonomi mencapai 109,1% cenderung menurun 8,5% dari tahun 2012 hal tersebut dipicu karena pengeluaran daerah meningkat signifikan dari tahun 2010-2013 sedang-

kan pendapatan meningkat tidak begitu signifikan dari tahun 2010-2013.

#### Uji Rasio Efisien

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terwujudnya PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik, sebaliknya semakin tinggi rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin rendah. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio efisiensi pemerintah kabupaten Bantul:

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010–2013 (dalam Ribuan).**

No.	Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisien	Ket.
1.	2010	1.403.064	81.637.099,07	171,8%	*
2.	2011	841.609	128.896.456,41	65,2%	**
3.	2012	2.420.586	166.597.778,56	145,2%	*
4.	2013	2.841.972	224.197.864,31	126,7%	*

Sumber: Data sekunder, diolah 2015.

Keterangan : \* : Tidak Efisien  
\*\* : Sangat Efisien

Dari tabel di atas menggambarkan analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bantul berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari ekonomis, efisien, dan efektivitas. Hasil uji *value for money* menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul pada tahun 2010 dikatakan tidak efisien yaitu sebesar 171,8% hal tersebut dipicu karena pemerintah kabupaten Bantul kurang efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola sumber-sumber PAD, pada tahun 2011 angka rasio turun menjadi 65,2% yang berarti pemerintah kabupaten Bantul dikatakan sangat efisien karena pemerintah kabupaten Bantul dalam merealisasikan PAD cukup besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD, kemudian pada tahun anggaran 2012 rasio efisien

mencapai 145,2% pemerintah kabupaten Bantul dikatakan tidak efisien karena pada tahun tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan PAD banyak mengeluarkan biaya, tahun anggaran 2013 mencapai 126,7% pemerintah kabupaten Bantul dikatakan tidak efisien hal tersebut dipicu karena biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD terlalu besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD.

#### Uji Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan pendapatan PAD yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio efektifitas pemerintah kabupaten Bantul:

**Tabel 5. Rasio Efektifitas Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam Ribuan).**

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan PAD	Target Pendapatan PAD	Rasio Efektifitas	Ket.
1.	2010	81.637,07	32.519,0	251,0%	**
2.	2011	128.896,41	52.867,5	243,8%	**
3.	2012	166.597,56	72.363,5	230,2%	**
4.	2013	224.197.31	110.348,2	203,1%	**

Sumber: Data sekunder, diolah 2015.

Keterangan \*\*: Sangat Efektif

Dari tabel diatas menggambarkan analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bantul berdasarkan konsep *value for money* yang terdiri dari ekonomis, efisien, dan efektifitas. Hasil uji *value for money* menunjukkan bahwa rasio efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul di atas cukup baik karena rasio efektifitas diatas 100% yang ditunjukkan pada tahun 2010 mencapai 251,0%, tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 7,2% dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 243,8 ], hal tersebut dipicu karena hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan. Pada tahun anggaran 2012 pengelolaan keuangan kabupaten Bantul dikatakan sangat efektif mencapai 230,2% dan tahun 2013 mencapai

203,1% meskipun persentase rasio efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul mengalami penurunan namun realisasi pendapatan PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terus meningkat. Hal ini dipicu karena peningkatan pajak dan retribusi daerah dari tahun 2010-2013 kenaikannya tidak signifikan. Untuk memperoleh rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh pemerintah kabupaten Bantul.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kabupaten Bantul berdasarkan analisis rasio sebagai berikut:

**Tabel 6. Perhitungan Rata-Rata Rasio.**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	Rata - Rata
1.	Rasio Ekonomis	91,7%	111,7%*	117,6 %*	109,1%	107,5%
2.	Rasio Efisiensi	171,8%	65,2%	145,2%*	126,7%	127,2%
3.	Rasio Efektifitas	251,0%	243,8%	230,2%	203,1%	232,0%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2015

Pada tabel 6 pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2013 pemerintah kabupaten Bantul berdasarkan rasio ekonomis dikatakan sangat ekonomis dalam merealisasikan penerimaan PAD karena realisasi penerimaan PAD lebih besar dibandingkan anggaran penerimaan PAD.

Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2013 pemerintah kabupaten Bantul berdasarkan analisis rasio efektifitas di-

katakan sangat efektif karena realisasi pendapatan PAD lebih besar dibandingkan target penerimaan PAD.

Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2013 pemerintah kabupaten Bantul berdasarkan analisis rasio efisiensi dikatakan tidak efisien karena Pemerintah kabupaten Bantul kurang efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola sumber-sumber penerimaan PAD.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul dikatakan cukup ekonomis pada tahun anggaran 2010 karena berada pada rentang dibawah 100% . Sedangkan pada tahun anggaran 2011 sampai 2013 dikatakan sangat ekonomis karena berada di atas rentang 100%.
2. Pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul dikatakan tidak efisien pada tahun anggaran 2010 hal tersebut dipicu karena pemerintah kabupaten Bantul kurang efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola sumber-sumber PAD, kemudian pada tahun anggaran 2011 pemerintah kabupaten Bantul dikatakan sangat efisien. Kemudian pada tahun anggaran 2012-2013 pemerintah kabupaten Bantul dikatakan tidak efisien karena pada tahun tersebut pemerintah kabupaten Bantul banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai dan kegiatan-kegiatan tersebut mendukung terwujudnya PAD.
3. Pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bantul dikatakan sangat efektif dari tahun 2010-2013 meskipun persentase rasio efektif menunjukkan bahwa setiap tahunnya menurun namun realisasi pendapatan PAD terus meningkat dari tahun 2010-2013, hal tersebut dipicu karena pada tahun anggaran 2011 hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan dan pada tahun anggaran 2010-2013 pajak dan retribusi mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bantul serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kinerja

keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran.
2. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bantul harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, sehingga kepentingan masyarakat bisa terpenuhi sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Bantul.

## Daftar Pustaka

- Alni, Ilham. 2006. "*Analisis Kinerja Keuangan Belanja dengan Pendekatan Value for Money pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*". Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurrohman, Taufik. 2013. "*Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value for Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur*". Jember: Universitas Jember.
- Liando, Saerang, E, P, D, dan Elim, I. (2014). "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money*". ISSN 2303-1174, Jurnal Emba, Vol. 2 No.3, September 2014, Hal.1686-1694.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.



Natsir, Yunardi. 2008. *Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Aceh: Modus Aceh.

Nazril, Naim. 2013. "*Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota*

*Makasar*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.

Nugrahani, S, T. (2007). "*Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*". Akmenika UPY. Vol. 1. 2007.